

Tuesday, 02 February 2016  
**Kejati Maluku "Diserbu"**

## **Bupati SBB Jadi Target**

**Ambon** - Bupati SBB, Jacobus F Puttuleihalat menjadi target Kejati Maluku. Ia bakal diperiksa dalam sejumlah kasus dugaan korupsi, yang juga menyeret saudara kandungnya.



Kepastian pemeriksaan bupati dua periode yang selama ini terkesan kebal hukum itu, disampaikan Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejati Maluku, Benny Santosa kepada wartawan, menyikapi aksi demo puluhan OKP dan LSM, Senin (1/2).

Dalam aksi demo massa yang tergabung dalam Koalisi Suara Keadilan Saka Mese itu, mereka mengkritik habis Kejati Maluku. Mereka menilai, Korps Adhyaksa di Maluku hanya bisa menjerat pejabat "kelas teri" di Kabupaten SBB. Sementara penguasa dibiarkan lolos.

Mereka juga mengkritik tajam Kejati Maluku yang menggunakan pola penegakan hukum, tajam ke bawah, tumpul ke atas.

"Nanti kita ada mekanismenya, ada prosedurnya kita akan jadwalkan. Pihak-pihak yang diduga terkait dengan kasus itu dan jika ada bukti sah pihak-pihak yang diduga terlibat akan tetap," kata Santoso.

Tak hanya bupati, kata Santoso, mantan Kepala Disdikpora Kabupaten SBB, Bonjamina Dortje Puttuleihalat alias Lou, Fransyane alias Nane Puttuleihalat yang kini menjabat Kepala Disdikpora dan Plt Kadis PU Kabupaten SBB, Samuel Paulus alias Raymond Puttuleihalat. Mereka bertiga adalah saudara kandung bupati.

Kejati Maluku, Jan S Marinka yang saat itu juga hadir di ruang Aspidus, menegaskan, pihaknya akan konsisten dan profesional menangani kasus-kasus korupsi.

Marinka mengungkapkan, dirinya efektif betugas di Kejati Maluku pada 11 Januari 2016 lalu. Ia saat ini sementara melakukan konsolidasi personil, termasuk sedang membuat ruangan pemeriksaan tersendiri agar lebih mudah dipantau dan diketahui oleh media secara transparan.

"Kita saat ini lagi membuat tiga ruangan untuk pemeriksaan, kita ingin transparan supaya lebih mudah diketahui, teman-teman mau datang silahkan langsung bisa lihat tidak ada yang ditutupi," jelasnya.



## SUBBAG HUMAS DAN TU KALAMALUKU MEDIA SIWALIMA

Maringka mengatakan, kasus-kasus dugaan korupsi yang sudah naik tahap penyidikan tidak akan dihentikan. “Kami akan membentuk tim satuan khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi,” ujarnya.

### **Jalannya Demo**

Sebelum menyerbu Kantor Kejati Maluku, puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Suara Keadilan Saka Mese Nusa, Kabupaten SBB berorasi beberapa menit di depan Polsek Sirimau.

Mereka beraasal dari LSM Aliansi Indonesia yang dipimpin Farham Suneth, POSPERA Maluku pimpinan Ferry Kasale, HIMASEB diketuai Fadly Boufakar, LSM Walang Aspirasi yang dipimpin Cristian Sea, HIMASANU pimpinan Yandri Tuarisa, LSM LIRA dipimpin Yudin Hitimala, LSM Molucas Institut dikomandai Asman Poepessy, dan FM TALABATAI yang dipimpin Asnawy Patti.

Mereka membawa sejumlah spanduk diantaranya bertuliskan, “Tangkap Mafia Hukum di SBB”, “Jaksa Harus Transparan,” Jangan Hukum Tumpul Ke Atas Tajam Ke Bawah,” “Masyarakat SBB Melayat Penegakan Hukum di SBB oleh Kejati Maluku,” Jaksa Perlu Tolak Angin,” Segera Tersangkakan Nane Puttileihalat,” Terbongkar, Bupati SBB Kebal Hukum-Kejati Masuk Angin, dan “Bob Belut ooh Belut”.

Mereka juga membawa sebuah krans bunga bertuliskan, “Turut Berduka Cita, Melayat Kejati Maluku”.

Pantauan *Siwalima*, usai berorasi di depan Polsek Sirimau, sekitar pukul 11.00 WIT massa yang dipimpin oleh Ferry Kasale itu, bergerak ke Kantor Kejati Maluku.

Saat tiba, pagar pintu Korps Adhyaksa tersebut terkunci rapat. Nampak belasan aparat kepolisian berjaga-jaga. Secara bergantian mereka melakukan orasi. Menggunakan megaphone, mereka meneriaki sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten SBB yang diduga melibatkan bupati dan keluarganya.

Kasus-kasus tersebut diantaranya, dugaan korupsi biaya tidak terduga tahun 2013. Kejati Maluku telah menetapkan eks Kadis PPKAD Kabupaten SBB, Ronny Rumahlatu sebagai tersangka. Sementara bupati yang mengeluarkan “surat sakti” untuk mencairkan anggaran tersebut, tak disentuh.

Selanjutnya dugaan korupsi dana pendidikan di Disdikpora tahun 2013. PPTK Ledrik Sinanu telah menjadi tersangka. Ironisnya, mantan Kepala Disdikpora Bonjamina Dortje Puttileihalat alias Lou, dan Fransyane alias Nane Puttileihalat yang saat ini menjabat Kepala Disdikpora yang diduga kuat terlibat, dibiarkan bebas.

Begitupun dengan proyek pembangunan Gapura SBB tahun 2014 senilai Rp 5,6 milyar yang sudah ditutup dengan alasan tak ditemukan kerugian negara.



Kasus lainnya, adalah alokasi dana desa tahun 2013. Dana Rp 1 milyar lebih tidak dapat dipertanggungjawabkan. Plt Kadis PU Kabupaten SBB, Raymond Puttileihalat menggunakan Rp 600 juta untuk kepentingan pribadi. Pengusutan kasus ini tak jelas.

“Kejati Maluku harus konsisten untuk mengawal kasus korupsi di SBB. Tikus-tikus kantor yang dengan seenaknya mengasak dan merampok brangkas daerah untuk kepentingan pribadi dan golongan,” teriak Ferry Kasale.

Kurang lebih dua jam berorasi, belum tampak pimpinan Kejati Maluku keluar menemui mereka. Suasana makin memanas, ketika massa yang terlihat mulai emosi berupaya untuk mendorong pintu pagar.

Aparat kepolisian dan sejumlah pegawai Kejati Maluku berupaya keras menahan pintu agar tidak roboh. Aksi saling dorong pun terjadi, sehingga nyaris ricuh.

Salah seorang pegawai kejaksaan yang berpakaian preman mencoba memberikan penjelasan bagi massa, tetapi mereka balik mempertanyakan identitasnya, karena tidak berpakaian dinas.

Massa ngotot agar Kajati menemui mereka. Disaat aksi demo nyaris ricuh, Aspidus keluar menemui mereka.

Kepada Aspidus salah seorang pendemo menyerahkan krans bunga bertuliskan, “Turut Berdukacita Atas Matinya Penegakan Hukum di SBB oleh Kejati Maluku.

Kemudian seorangnya lagi membacakan pernyataan sikap mereka, yaitu *satu*, meminta Kejati segera menangkap Nane Puttileihalat selaku Kepala Disdikpora Kabupaten SBB.

*Dua*, meminta Kejati Maluku segera memanggil Bupati SBB, Jacobus Puttileihalat atas kasus BTT. *Tiga*, meminta Kejati Maluku tak menghilangkan kasus proyek pembangunan Gapura senilai Rp 5,6 milyar. *Empat*, meminta Kejati Maluku menuntaskan kasus perampokan brangkas di Kabupaten SBB

Setelah menerima pernyataan sikap tersebut, Aspidsus mengatakan, pemeriksaan bupati segera dijadwalkan.

“Kita akan lihat pihak-pihak terkait yang diduga terlibat dalam semua kasus dan kita akan jadwalkan, karena harus ada mekanismenya,” jelasnya singkat.

Usai mendengar penjelasan Aspidsus, para pendemo kemudian membubarkan diri.

### **Kasus Gapura Jalan**

Entah siapa yang harus dipercaya? Sebelumnya Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia mengumumkan ke publik melalui media massa kalau penyelidikan kasus gapura Kabupaten SBB ditutup dengan alasan tidak ditemukan kerugian negara. Anehnya, Aspidsus



Benny Santoso menegaskan, pengusutan kasus tersebut masih berjalan. “Kasusnya masih dalam penyelidikan,” kata Aspidsus, kepada wartawan.

Aspidsus yang ditanya, apakah kasus ini dibuka lagi, setelah sebelumnya ditutup, ia berkomentar. Ia hanya mengatakan, kasusnya masih dalam penyelidikan.

Kala itu, Palapia mengatakan, penyelidikan kasus Gapura SBB dihentikan, usai tim penyidik menggelar eskpos di ruang kerja Kajati Maluku, Selasa (19/1) lalu. Ekspos itu, juga dihadiri Wakajati Manumpak Pane, para asisten, koordinator dan kasi penyidik di lingkup Kejati. “Kasus ini sudah ditutup karena jaksa tidak menemukan kerugian negara,” katanya, kepada *Siwalima*, Jumat (22/1).

Untuk diketahui, proyek ini awalnya dikerjakan dengan APBD setempat tahun 2014 senilai Rp 2,8 milyar. Namun ternyata dana sebesar itu tidak cukup. Kemudian dianggarkan lagi Rp 2,8 milyar dalam APBD tahun 2015. **(S-19/Mg-3)**